

# GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	Suara Pembanyuan	6	02-08-2002

## Pemerintah Akan Tetap Ikuti Keputusan Sidang Kabinet soal KPC

JAKARTA - Kendati keputusan sidang kabinet terbatas tentang divestasi saham PT KPC diprotes Pemprov Kaltim, pemerintah pusat menjamin proses divestasi saham itu akan berjalan sesuai yang direncanakan. Bila Pemprov Kaltim menolak membeli sisa saham yang akan ditawarkan kepadanya, saham tersebut akan ditawarkan kepada pihak lain.

"Keputusan menawarkan saham sebanyak 31 persen kepada daerah itu kan keputusan negara. Jadi, itulah yang akan dilaksanakan. Kalau mereka akhirnya mengurangi niatnya membeli saham tersebut, ya kami akan menawarkan kepada pihak lain," kata Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Wimpy S Tjetjep kepada *Pembaruan*, di Jakarta, Kamis (1/8).

Seperti diketahui, keputusan pemerintah soal divestasi PT KPC menurut Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, telah diputuskan dalam Rapat Kabinet Terbatas yang dihadiri oleh Presiden, Wapres, tiga Menko, Menteri ESDM, Mendagri, Panglima TNI, dan Kapolri pada Selasa (30/7) malam di Istana Merdeka, Jakarta.

Selain Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur, saat ini juga muncul perusahaan-perusahaan swasta nasional lain yang berminat membeli saham. Selain PT Intan Bumi Inti Pradana yang akan digandeng Pemprov Kaltim, pelamar lainnya adalah PT Batu Bara Borneo Batuah, PT Nusantara Energi, PT Centralink, PT Batu-bara Bukit Asam.

Wimpy yakin, akan ba-

nyak lagi perusahaan swasta nasional yang berminat membelinya karena dalam hitungan bisnis, perusahaan itu sangat menguntungkan. "Dalam waktu enam tahun, uang yang akan digunakan untuk membeli saham itu sudah kembali. Siapa yang tidak mau?" tanyanya.

Terbetik kabar, PT Intan Bumi Inti Pradana akan mengundurkan diri sebagai calon pembeli bila pemerintah pusat tidak memberi 51 persen saham kepada Pemprov Kaltim. Pasalnya, tidak ada penyandang dana yang mau mendanai langkahnya bila saham yang akan diambil kurang dari 51 persen.

PT Intan Bumi sendiri selama ini berkomitmen dengan Pemprov Kaltim akan memberi hibah murni setara 10 persen dari 51 persen saham PT KPC yang akan diambil, serta 10 persen saham *goodwill* (saham yang akan diberikan sebagai hibah namun harganya dikompensasikan dulu dengan jumlah dividen yang diperoleh dari saham) sebesar 10 persen dari 51 persen saham. Selain itu, mereka juga berjanji akan membangun rumah sakit untuk daerah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) PL Coutrier mengatakan, keputusan yang telah diambil pemerintah itu harus dipertahankan demi menjaga wibawa pemerintah. Jika pemerintah tak bisa mempertahankan keputusannya, tentu investor asing akan bertanya-tanya, siapa yang berkuasa di negara ini.

"Yang sudah diputuskan harus dijaga. Kalau tidak, investor asing tentu akan eng-

gan melakukan investasinya di sini karena mereka akan mempertanyakan kewibawaan pemerintah," katanya di Jakarta, Kamis (1/8).

Lebih lanjut, Coutrier berharap, pemerintah dapat mencegah terjadinya gangguan produksi yang rencananya akan dilakukan oleh sekelompok masyarakat Kaltim. Kalau pemerintah tak dapat menjamin kelancaran produksi, tentu ini akan berakibat kepada menurunnya kepercayaan investor terhadap pemerintah.

Sementara itu, kegiatan produksi PT KPC berjalan normal seperti biasa. Situasi di Sangatta pun jauh mereda dibanding sehari sebelumnya. Presiden Direktur PT KPC, Noke Kiroyan kepada *Pembaruan* mengatakan, masih ada konsentrasi masa di depan gedung DPRD. Namun hal itu tidak mengganggu operasi perusahaan.

Pada kesempatan itu, Noke membantah dirinya sempat disandera oleh pendemo. "Kami hanya berdialog karena mereka meminta kepastian bahwa penawaran saham telah dilakukan. Semula mereka tidak percaya dengan penjelasan saya, tetapi setelah saya menelpon Sekjen Departemen ESDM Djoko Darmono, mereka mempercayainya. Dan saya bisa pulang pukul 19.00 WIT," kata Noke.

### Tegang

Namun, kondisi terakhir memperlihatkan, situasi di Kota Sangatta menegang. Kendati sejauh ini pihak kepolisian setempat menyatakan keadaan aman terkendali, sebagian besar karyawan KPC resah menyusul keluarnya rekomendasi DPRD

Kaltim untuk menutup kegiatan produksi batu bara KPC.

Terlebih rekomendasi DPRD Kaltim No 16/2002 yang berisi lima hal, Rabu (31/7) malam itu, diperkuat oleh rekomendasi DPRD Kutim dalam rapat paripurnanya yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kutim Drs Alex Rohmanu, Kamis (1/8). Sementara ratusan pemuda dari berbagai ormas, OKP, dan LSM masih disiagakan di Sangatta.

Tokoh pemuda Kaltim Amir P Alie kepada *Pembaruan* mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan masa dalam jumlah yang lebih besar untuk memblokir KPC. Jika dalam waktu dekat KPC masih tidak bersedia menawarkan seluruh saham yang divestasikan hanya kepada Kaltim, dan produksi tidak dihentikan, pihaknya bersama semua elemen warga akan memblokir kegiatan KPC.

"Ini sesuai dengan keinginan DPRD Kaltim yang meminta semua pihak dapat mengawasi dan mengamankan keputusan dewan," kata Amir P Alie.

Sementara itu menjaga hal yang tidak diinginkan, pihak keamanan memperketat penjagaannya terhadap KPC. Menurut Kapolres Bontang Ajun Kombes Arief Wicaksono, telah dikerahkan 250 petugas keamanan ke Sangatta. Terdiri 160 pasukan Brimob Polda Kaltim dan 90 pasukan Rudal Kodim Bontang.

"Kami dalam kondisi siaga penuh. Tapi, kami berharap tak ada pihak mana pun yang berani mencoba-coba memaksakan kehendak dengan menduduki KPC. Kami akan bertindak tegas," kata Kapolres. (130/K-10)